

TATA KELOLA KONFLIK KEBERADAAN PABRIK GULA CAMMING TERHADAP KEHIDUPAN SOSIAL MASYARAKAT DI DESA WANUAWARU

Jaelan Usman^{*1)}, Muhammad Riswandi²⁾, Budi Setiawati³⁾,
Hardianto Hawing⁴⁾

¹²³⁴Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas
Muhammadiyah Makassar

*Email : jaelan.usman@unismuh.ac.id

ABSTRACT

The purpose of this study is to effectively manage conflict, avoid and prevent conflict from arising, and determine the effects of conflict management on Wanuwawaru Village's social life in relation to the presence of a camming sugar mill. A case study technique is the kind of research that is employed. The results of the study highlighted conflict governance related to the existence of the Camming sugar factory in the aspect of social life, focusing on four main indicators. First, Environmental Governance in Camming Sugar Factory Waste Management is discussed through four approaches to conflict resolution strategies. The first approach is Avoiding, where all parties work together to prevent conflict. Second, Accommodating refers to handling conflicts by considering various incoming opinions, by gathering and resolving conflicts inclusively. The third approach, Compromising, emphasizes taking into account the opinions and interests of all parties. The negotiation process is engaged to address conflicts that may affect people's social lives, by reaching an agreement that benefits all parties. Finally, Collaboration as the fourth approach describes how both parties engage on an ongoing basis to resolve existing conflicts.

Keywords: Conflict Governance, Community Social Life, Camming Sugar Factory

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini yaitu untuk terkelolanya konflik dengan baik dan sebagaimana menghindari dan mencegah terjadinya konflik dan untuk mengetahui bagaimana tata kelola konflik keberadaan pabrik gula camming terhadap kehidupan sosial di Desa Wanuwawaru. Tipe penelitian yang digunakan adalah pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menyoroti tata kelola konflik terkait keberadaan pabrik gula Camming dalam aspek kehidupan sosial, dengan fokus pada empat indikator utama. Pertama, Environmental Governance dalam Pengelolaan Limbah Pabrik Gula Camming dibahas melalui empat pendekatan strategi penyelesaian konflik. Pendekatan pertama adalah Menghindari (Avoiding), di mana semua pihak berupaya bersama-sama untuk mencegah konflik. Kedua, Menyesuaikan (Accommodating) merujuk pada penanganan konflik dengan mempertimbangkan berbagai pendapat yang masuk, dengan mengumpulkan dan menyelesaikan konflik secara inklusif. Pendekatan ketiga, Kompromi (Compromising), menekankan cenderung memperhatikan pendapat dan kepentingan semua pihak. Proses negosiasi dilibatkan untuk mengatasi konflik yang dapat memengaruhi kehidupan sosial masyarakat, dengan mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak. Terakhir, kerja sama (Collaboration) sebagai pendekatan keempat menggambarkan bagaimana kedua pihak terlibat secara berkelanjutan untuk menyelesaikan konflik yang ada.

Kata Kunci : Tata Kelola Konflik, Kehidupan Sosial Masyarakat, Pabrik Gula Camming

PENDAHULUAN

Perusahaan di Indonesia yang kini mengalami perkembangan yang pesat, sejalan dengan semakin banyaknya kebutuhan masyarakat. Suatu perusahaan yang merupakan kegiatan usaha yang dilakukan oleh suatu organisasi dimana sumber daya menjadi bahan baku serta tenaga kerja yang dilakukan oleh masyarakat untuk menghasilkan barang dan jasa (Liana et al., 2021). Ada beberapa manfaat dan keuntungan finansial yang diberikan kepada masyarakat umum oleh keberadaan perusahaan. Selain untuk memenuhi kebutuhan masyarakat umum, perusahaan juga berfungsi sebagai sumber lapangan pekerjaan bagi mereka yang membutuhkan (Azizah, 2018). Masyarakat umum memanfaatkan era industri ini untuk meningkatkan taraf hidup (Sari, 2018). Keberadaan perusahaan memiliki dampak positif dan negatif, dimana dengan dampak positif yang jauh lebih besar ketika segala sesuatunya berjalan dengan baik dan begitupun sebaliknya sehingga dengan adanya dampak negatif bisa saja menimbulkan konflik (Pulungan, 2017).

Keberadaan suatu perusahaan yang mampu membawa perubahan terhadap kehidupan masyarakat dan juga dapat muncul suatu konflik satu sama lain dengan keberadaan suatu perusahaan yang membawa perubahan kehidupan masyarakat yang tidak sesuai, konflik memang dianggap sebuah keniscayaan bagi masyarakat manapun. Namun penting juga untuk diingat bahwa konfrontasi antara masyarakat dan perusahaan perkebunan sering kali disebabkan oleh praktik pemerintah (pusat atau daerah) yang mengeluarkan izin tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan masyarakat (Basri & Nurhamlin, 2015).

Sesuai yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, keluarnya undang-undang ini karena maraknya terjadi konflik yang terus-menerus terjadi, sehingga perlu di keluarkan kebijakan yang mengharuskan melakukan penanganan maupun melakukan penghindaran atas konflik yang terjadi. Konflik sosial yang dimaksud dalam kebijakan undang-undang ini adalah pertikaian dan/atau perjumpaan kekerasan fisik antara dua atau lebih kelompok masyarakat yang berlangsung dalam jangka waktu tertentu dan mempunyai dampak yang luas sehingga menimbulkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial, mengganggu stabilitas nasional, dan menghambat pembangunan. pembangunan nasional. Selain itu, penanganan konflik memerlukan sejumlah tindakan yang diambil secara sengaja dan metodis dalam keadaan dan peristiwa yang muncul sebelum, selama, dan setelah perselisihan, termasuk

penghindaran konflik, penyelesaian konflik, dan penyembuhan pasca konflik (*UU RI*, 2012).

Agar suatu korporasi bisa eksis, masyarakat pada akhirnya harus mengalami perubahan sosial, yang berarti banyak hal yang harus disalahkan, termasuk kemajuan teknis, perselisihan sosial, etnis, agama, ras, dan kelas sosial. Sebagai makhluk sosial, masyarakat dengan demikian harus mampu memandang lingkungan hidup secara keseluruhan agar dapat memahami akibat yang ditimbulkan perusahaan terhadap kehidupan sosial masyarakat. Perubahan sosial dalam masyarakat adalah ketika terjadi pergeseran yang berdampak pada struktur sosial, kebiasaan, dan perilaku masyarakat secara keseluruhan (Rizaldi, 2021). Dalam mengelola dan menangani terjadinya konflik diperlukan peran penting pemerintah dalam mengharuskan kerjasama antara manusia, dimana manusia sangat berperan penting untuk mengelola dan menghindari/menangani konflik yang terjadi dan juga yang tidak terjadi. Dari pemerintah hingga masyarakat umum, ada rasa tanggung jawab bersama untuk menangani atau mengelola konflik yang ada terkait adanya perusahaan (Irwina, 2023).

Untuk memenuhi permintaan gula lokal dan berkontribusi terhadap pertumbuhan nasional, keberadaan perusahaan manufaktur gula sangatlah penting. Dalam sektor fiskal, moneter, dan riil perekonomian nasional, tanaman gula juga cukup penting. Prosedur pemanenan, pengelolaan limbah, dan aspek lain dari operasional perusahaan perkebunan pabrik gula menjadi faktor-faktornya. Perusahaan yang mengoperasikan perkebunan pabrik gula dapat mengubah medan, flora dan fauna, struktur tanah, pola aliran air permukaan dan air tanah, serta aspek ekosistem lainnya. Dampak dari perubahan ini bervariasi dalam kekuatan dan jenisnya. Bisnis tidak hanya berdampak pada lingkungan fisik tetapi juga kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi lingkungan sekitar (Tuo, 2017).

Perubahan norma sosial masyarakat, pola tingkah laku, struktur organisasi, penempatan lembaga sosial, stratifikasi sosial, hubungan antar manusia, dan lain-lain. Faktanya, masyarakat sedang mengalami pergolakan yang pesat (Nurkomala, 2018). Seperti halnya studi kelayakan Proyek Gula Camming Sulawesi Selatan yang dilakukan di Desa Wanuwuru oleh perusahaan PTP XX (Persero) yang didirikan bekerja sama dengan PT. Tanindo Jakarta dan Victorias Milling firm, Inc., Filipina. Setelah Bupati KDH Tk.II Bone mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 84/DnY/Kpts/V/1981 tanggal 18 Mei 1981 yang menetapkan peruntukan perkebunan tebu seluas 9.000 hektar, maka tidak ada lagi persoalan mengenai penguasaan tanah. Hanya 7.200 hektar dari lahan yang diteliti yang cocok untuk menanam tebu; sisa hektarnya dapat digunakan untuk

infrastruktur, kompleks industri, kawasan pemukiman, dan penggunaan lainnya. Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 668/Kpta/org/1981 tanggal 11 Agustus 1981 yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan gula dalam negeri, maka Pabrik Gula Camming resmi dibangun. PTP XX (Persero), pembawa SK, membudidayakan tebu di wilayah Camming untuk melakukan hal tersebut. Pada awal tahun 1985, PTP XX (Persero) dan The Triveni E.W India bekerja sama membangun pabrik gula dengan kapasitas 3000 TCD, dan pada tanggal 2 Agustus 1986, penggilingan pertama Pabrik Gula Camming telah selesai dibangun. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1991 dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 950/KMK-013/1991 dan Nomor 951/KMK-013/1991. Untuk mengoperasikan Pabrik Gula Sulawesi Selatan, antara lain Pabrik Gula Tulang, Pabrik Gula Takalar, dan Pabrik Gula Camming, didirikanlah PTP XXXII (Persero) yang berkantor pusat di Ujung Pandang. 3 Reorganisasi BUMN bidang pertanian dilakukan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 361/KPTS/07.210/5/1994 tanggal 9 Mei 1994. Grup Sulawesi-Maluku-NTTIrian Badan Usaha, PTP XXXII (Persero), terdiri dari tiga kelompok usaha di Indonesia Timur: PTP XXXII (Persero), PTP XXVIII (Persero), dan Bina Mulya Ternak. PTP Nusantara XIV (Persero) didirikan pada tanggal 11 Maret 1996 dengan Akte Notaris Harun Kamil SH No. 47 tanggal 11 Maret 1996 berdasarkan Surat Keputusan : • Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 334/Kpts/KP.510 /94 tanggal 3 Mei 1994; Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 1996 tanggal 4 Februari 1996; Menteri Keuangan RI Nomor 173/KMK.016/1996 tanggal 11 Maret 1996; Pabrik Gula Camming kini menjadi salah satu fasilitas produksi PTP Nusantara XIV (Persero).

Hadirnya perusahaan di Desa Wanuwuru Kecamatan Libureng Kabupaten Bone diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat karena perusahaan ini memungkinkan masyarakat untuk diikutsertakan dan mengisi lowongan pekerjaan sehingga akan mengubah kehidupan bermasyarakat. dan membantu masyarakat mewujudkan cita-citanya untuk hidup bermasyarakat yang adil dan makmur.

Kenyataannya, kehadiran Pabrik Gula Camming di Desa Wanuwuru memberikan dampak negatif terhadap masyarakat karena terbukanya lapangan kerja, namun juga berdampak positif terhadap kemungkinan terjadinya konfrontasi antar tetangga. Ada pula yang berpendapat bahwa kehadiran pabrik Gula Camming akan menimbulkan konflik karena inkonsistensi yang muncul, seperti punahnya tanaman warga sekitar berupa sayuran akibat limbah produksi. Dan yang sering terjadi ialah

dimana para pekerja yang diangkat kebanyakan dari luar daerah dan sulit untuk membuka ruang untuk masyarakat sekitar, hal ini sebagian besar persepsi dari masyarakat. Akan tetapi lambat laun Pabrik Gula Camming sangat berpengaruh positif terhadap masyarakat karena banyaknya lapangan pekerjaan yang terbuka. Tetapi adanya persepsi masyarakat hal dimana adanya yang ketidaksesuaian, maka dari itu pemerintah bertanggung jawab penuh terhadap apa yang terjadi.

Ada dua dampak kenapa konflik bisa terjadi di desa Wanuwawaru, dampak yang pertama adalah ada beberapa atau sudah banyak Masyarakat yang masih bekerja tapi disisi lain hal itu juga tidak cukup karena banyaknya Masyarakat di desa Wanuwawaru yang masih menganggur di karenakan kebutuhan Perusahaan terbatas sedangkan Angkatan kerja di desa Wanuwawaru itu semakin tahun semakin bertambah, jadi tidak semuanya bisa diterima oleh Perusahaan. Sedangkan, dampak yang kedua adalah polusi udara pada saat giling dalam artian pada saat Perusahaan ini beroperasi, banyak Masyarakat yang sering mengeluh bahwa adanya semacam debu hitam yang terbang ikut Bersama angin dan memasuki rumah Masyarakat.

Istilah dan konsep *governance* diperkenalkan dalam konteks keraguan sejumlah pihak melihat efektifitas lembaga pemerintahan dan negara dalam menangani berbagai penyalahgunaan yang dilakukannya sendiri, terutama dalam soal korupsi atau penyelewengan dana-dana pembangunan (Arfani, 2005). Untuk menjaga dan menjamin kelangsungan dana bantuan yang diberikan kepada negara penerima, lembaga pendanaan internasional seperti Bank Dunia, *United Nations Development Program* (UNDP), dan *International Monetary Finance* (IMF) pertama kali mengembangkan gagasan tata pemerintahan yang baik. Menurut para pemberi bantuan, bantuan kepada negara-negara di seluruh dunia, khususnya negara-negara berkembang, akan sulit berhasil tanpa tata kelola yang baik. Kata “*governance*” dan “*good governance*” telah berkembang selama sepuluh tahun terakhir untuk menggambarkan bagaimana pemerintahan suatu negara dijalankan. Secara umum, tata kelola adalah proses pengambilan keputusan pada berbagai tingkat pemerintahan. Dalam *good governance* tidak hanya pemerintah, tetapi juga warga, masyarakat, terutama sektor usaha/swasta yang berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Jadi ada penyelenggara pemerintah, penyelewengan swasta, dan organisasi masyarakat. (Faisah & Prianto, 2015)

Karena ketiga pilar pemangku kepentingan—pemerintah, sektor publik, dan sektor swasta—berada pada posisi yang setara dan saling mengontrol, maka tata kelola yang baik mencakup komponen-komponen yang rumit (Faisah & Prianto, 2015). Agar

salah satu komponen tidak disalahgunakan oleh komponen lainnya, maka interaksi ketiga komponen tersebut perlu diseimbangkan dan dikelola oleh masing-masing komponen. Ketika salah satu komponen lebih besar dari yang lain, hal ini penting dilakukan untuk menghindari dominasi kekuasaan (Tahir, 2019).

Kata konflik berasal dari bahasa latin *configura* yang berarti menyerang. Menurut sosiologi, konflik digambarkan sebagai proses sosial antara dua orang atau lebih (atau kelompok) di mana salah satu pihak berusaha menghilangkan pihak lain dengan merusak atau melemahkan pihak tersebut. Sebagai hubungan antara dua pihak atau lebih (individu atau organisasi) yang mempunyai tujuan atau kepentingan berbeda, konflik juga dapat dilihat dari sudut pandang ini. Konflik adalah ketidakkonsistenan antara harapan individu terhadap dirinya sendiri, individu lain, dan organisasi, dengan apa yang sebenarnya diantisipasi. Hubungan yang saling bergantung dapat menimbulkan konflik selain kemampuan kemitraan untuk mendorong kolaborasi. Konflik merupakan kejadian umum yang tidak dapat dicegah dan dapat menghambat pencapaian tujuan perusahaan.

Tata Kelola Konflik (*conflict governance*) ialah tata kelola yang belum begitu populer, Suatu proses tindakan dan juga reaksi yang dilakukan oleh para pelaku konflik atau pihak ketiga (atau pihak-pihak yang terlibat) secara rasional dan seimbang, guna mengendalikan situasi dan kondisi perselisihan yang timbul, dikenal dengan istilah manajemen konflik dalam ilmu-ilmu sosial Indonesia, antara sejumlah pihak. Sekalipun tata kelola konflik dipandang lebih didasarkan pada konsep ideal demokrasi, kedua konsep tersebut tidak jauh berbeda satu sama lain (Khairunnisa et al., 2020).

Strategi keamanan bertujuan untuk membatasi kebebasan, terutama ketika terjadi mobilisasi luas yang bernuansa kekerasan. Institusi kepolisian menjadi penanggung jawab utama dan menjadi aparat keamanan dalam situasi ini. Untuk memobilisasi aparat keamanan ke pusat-pusat mobilisasi massa, menganalisis dinamika konflik di masyarakat sehingga dapat dilakukan intervensi dini untuk menghentikan eskalasi kekerasan, dan meyakinkan massa yang siap melakukan aksi kekerasan, institusi kepolisian harus memiliki atribut-atribut tersebut.

Tujuan dasar dari manajemen konflik adalah untuk mengubah konflik destruktif yang bermanifestasi sebagai kekerasan menjadi konflik konstruktif yang bermanifestasi sebagai percakapan dan negosiasi perdamaian. Lembaga ini tidak dipercaya untuk menyelesaikan permasalahan karena para pihak yang bersengketa akan melakukannya melalui proses perundingan.

Menurut komponen pendekatan konflik, masyarakat merupakan tempat terjadinya konflik, yang menuntut setiap orang mampu menggambarkan keadaan, menganalisisnya, dan bernegosiasi dengan pihak lawannya. Menurut teori ini, masyarakat terdiri dari komponen-komponen yang saling terhubung satu sama lain dengan cara yang dapat diprediksi. Strategi ini menyoroti kenyataan bahwa konflik bukan hanya merupakan gejala masyarakat; sebaliknya, hal ini terlihat muncul dari permasalahan sosial. Setiap budaya mengakui adanya ketimpangan alokasi kekuasaan, yang berujung pada terbentuknya dua kelompok sosial, yaitu mereka yang mempunyai otoritas. Karena akan ada kepentingan yang berlawanan dalam pembagian kewenangan, hal ini dipandang sebagai sumber konflik dalam metode konflik.

Untuk mengatur keadaan dan hasil konflik atau perselisihan antara dua pihak atau lebih, pelaku konflik atau pihak ketiga terlibat dalam serangkaian tindakan dan reaksi yang masuk akal dan seimbang. Metode komunikasi antara pelaku konflik dan pihak luar, serta bagaimana hal tersebut mempengaruhi interpretasi dan kepentingan, semuanya merupakan bagian dari pendekatan manajemen konflik yang berorientasi pada proses. Konflik muncul sebagai akibat dari variabel organisasi dan manusia (Sudarmanto et al., 2021). Kehidupan Sosial Komunitas adalah kehidupan sosial yang terdiri dari aspek-aspek sosial, dimana masyarakat saling mendukung satu sama lain, dan di dalamnya terdapat rasa empati yang besar antar komunitas.

Struktur dan proses hidup berdampingan dengan orang lain dalam suatu lokasi yang sering disebut masyarakat merupakan suatu hal yang memerlukan kajian yang sistematis. Selain itu, masyarakat manusia sebagai suatu sistem interaksi sosial telah menarik perhatian sejak manusia pertama kali mengembangkan kebudayaan dan peradaban. Sistem budaya dapat diperiksa dengan menggunakan berbagai metode, termasuk teknik pemodelan (wawasan) konseptual dan sistematis. Makhluk yang mampu menghasilkan peradaban adalah manusia. Budaya dan peradaban saling terkait erat. Untuk memenuhi keinginannya, masyarakat menggunakan kecerdikan, selera, dan inisiatifnya untuk menciptakan budaya.

Struktur sistem sosial, atau sistem sosial, merupakan proses interaksi antar aktor sosial (actor). Keterkaitan antara aktor-aktor yang aktif dalam proses interaksi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam proses interaksi membentuk struktur sistem sosial yang disebut dengan jaringan relasi. Ia sangat menekankan penjelasannya mengenai hubungan dan persepsi sosial secara umum, namun ia tidak mengantisipasi substansi hubungan tersebut. Pendekatan fungsionalis saat ini bercirikan pendekatan analitis. Menurut

gagasan individu, peran dan kolektivitas merupakan landasan utama sistem sosial. Nilai dan norma merupakan pola primer, atau lebih tepatnya hubungan yang mengarah pada kesatuan. Karena sistem-sistem tersebut merupakan suatu keseluruhan yang kohesif dengan pertimbangan yang tepat terhadap nilai-nilai, standar-standar, dan tujuan-tujuan, maka berbagai status, posisi, dan peran yang saling terhubung dari orang-orang yang berinteraksi (dalam keluarga, pertemanan di penjara, universitas, kelompok, dan masyarakat) dapat dianggap sebagai sistem sosial serupa.

Berkumpulnya manusia akan mengakibatkan munculnya manusia-manusia baru sebagai hasil hidup berdampingan, serta sistem komunikasi dan hukum yang mengatur interaksi manusia. Kebudayaan berkembang sebagai hasil dari tatanan kehidupan komunal karena orang-orang mengidentifikasi satu sama lain. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa manusia membutuhkan manusia lain untuk bertahan hidup. Dalam situasi ini, jika ada orang lain yang hadir maka orang tersebut akan berinteraksi (Rizaldi, 2021).

Dengan keberadaan suatu perusahaan akan membawa suatu perubahan terhadap masyarakat sekitar, entah itu perubahan yang tidak menimbulkan konflik ataupun menimbulkan konflik antarsesama dengan membawa perubahan terhadap masyarakat. Karena perubahan sosial menentukan nilai suatu peradaban dan keadaan masyarakat, maka hal itu akan selalu terjadi dalam masyarakat. Apakah perubahan masyarakat mendorong terciptanya masyarakat yang sempurna atau justru sebaliknya. Dengan adanya perubahan yang juga akan membawa atau menimbulkan suatu konflik karena ketidaksesuaian atau lain hal yang tidak menyenangkan. Maka dari itu, cara tata kelola konflik untuk meminimalisir agar tidak terjadinya konflik dengan melakukan penghindaran dan juga penanganan apabila terjadi sesuai yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berlangsung selama dua bulan dan lokasi penelitian berada di masyarakat Wanuwawaru. Dengan mengangkat judul tata kelola konflik keberadaan Pabrik Gula Camming terhadap kehidupan sosial masyarakat di Desa Wanuwawaru. Alasan memilih objek lokasi penelitian itu ialah menjadi lokasi tempat berdirinya perusahaan. Bentuk penelitian ini bersifat kualitatif, dan tujuannya adalah untuk mengatasi suatu permasalahan secara menyeluruh dalam jangka waktu dan keadaan yang bersangkutan. Hal tersebut dilakukan secara wajar sesuai dengan keadaan yang ada di lapangan.

Landasan teori di manfaatkan untuk menjadi pandangan/pemandu agar kiranya fokus penelitian sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Langkah penelitian yang di maksud diantaranya melaksanakan pengamatan terhadap narasumber lapangan, melakukan interaksi pada mereka dan juga berusaha untuk memahami bahasa serta tafsiran narasumber. Akibatnya, peneliti harus melakukan perjalanan ke lapangan dan menghabiskan banyak waktu di sana.

Penelitian ini menggunakan metodologi studi kasus, yang memungkinkan pengumpulan informasi dari semua pihak dan tokoh kunci melalui observasi, wawancara, dan pencatatan. Intinya, informasi yang dikumpulkan melalui berbagai teknik sudah cukup dan saling melengkapi. Jika informasi yang diterima melalui wawancara tidak lengkap atau tidak mencukupi, pendekatan tambahan, seperti observasi dan pendokumentasian, harus dieksplorasi. Pengumpulan data merupakan suatu alat yang dipilih dan dimanfaatkan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data sehingga kegiatan tersebut menjadi sistematis dan sederhana. Teknik pengumpulan data adalah strategi atau prosedur yang mungkin digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data.

HASIL PENELITIAN

Untuk di bagian hasil penelitian dan pembahasan, di jelaskan terkait hasil dan pembahasan dari data yang telah didapat di lapangan baik itu melalui teknik wawancara, maupun melalui bahan tertulis dan juga observasi yang dilakukan disaat penelitian mencakup tata kelola konflik keberadaan Pabrik gula camming terhadap kehidupan sosial masyarakat di desa wanuwawaru.

Menghindari (*Avoiding*)

Individu atau organisasi pada umumnya cenderung menghindari konflik. Berbagai hal sensitif dan yang berpotensi menyebabkan konflik sebisa mungkin dihindari. Ini merupakan cara yang paling efektif menjaga lingkungan terhindar dari konflik terbuka. Sesuai dengan bentuk indikator menghindari konflik, prinsip utama yang diterapkan adalah melakukan hal-hal yang baik bersama-sama (Anugerah, 2014; Zuchdi, 2005). Sebelum adanya pabrik gula Camming, telah disepakati perjanjian untuk mencegah timbulnya perselisihan. Meskipun ada potensi masalah yang dapat menjadi pemicu konflik, upaya pencegahan dilakukan dengan melibatkan masyarakat dalam pengerjaan (borongan) yang dapat meningkatkan penghasilan mereka. Melalui keterlibatan aktif masyarakat dalam proyek ini, potensi konflik dapat diminimalkan karena adanya keuntungan ekonomi yang diperoleh. Pabrik gula Camming juga turut

berupaya semaksimal mungkin untuk menghindari potensi konflik, selalu memprioritaskan peluang bagi wilayah terdekat dan memastikan adanya manfaat bagi masyarakat sekitar.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip menghindari konflik yang diadopsi oleh masyarakat dalam konteks pabrik gula Camming telah berhasil diimplementasikan secara efektif. Ketidakhadiran insiden yang tidak diinginkan sejauh ini menjadi bukti konkret dari keberhasilan pendekatan ini. Adanya kerjasama antara pihak masyarakat dan pabrik gula Camming dalam menerapkan prinsip tersebut menciptakan lingkungan yang kondusif untuk kehidupan sosial yang harmonis. Keberadaan pabrik gula Camming, dari hasil penelitian, dapat dianggap sebagai aset yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat setempat. Dampak positif ini tercermin dalam peningkatan penghasilan melalui proyek pengerjaan (borongan) yang melibatkan masyarakat secara langsung. Adanya manfaat ekonomi ini tidak hanya merangsang pertumbuhan ekonomi lokal tetapi juga membantu mengurangi potensi konflik yang mungkin muncul akibat ketidaksetaraan sosial dan ekonomi.

Selain itu, keberadaan pabrik gula Camming juga menciptakan iklim harmoni antara pihak pabrik dan masyarakat setempat. Kolaborasi aktif dan komunikasi terbuka antara kedua belah pihak telah memainkan peran kunci dalam menjaga hubungan yang baik. Prinsip menghindari konflik tidak hanya dijadikan norma oleh masyarakat tetapi juga direspons dengan keseriusan oleh pabrik gula Camming, yang senantiasa berusaha untuk menghindari potensi perselisihan dan selalu memprioritaskan manfaat bagi wilayah terdekat. Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip menghindari konflik telah menjadi landasan yang kuat dalam membangun hubungan positif antara pabrik gula Camming dan masyarakatnya. Dengan demikian, penelitian ini memberikan wawasan berharga tentang bagaimana implementasi prinsip-prinsip ini dapat menghasilkan dampak positif dalam konteks kerjasama antara industri dan masyarakat lokal.

Menyesuaikan (*Accomoding*)

Ini adalah metode untuk mengumpulkan sudut pandang yang berbeda dari beberapa pihak yang terlibat dalam suatu permasalahan. Kelompok dapat menemukan solusi dengan tetap mengutamakan kepentingan salah satu pihak yang bersaing dengan mengumpulkan berbagai sudut pandang. Kelemahan metode ini adalah masih dapat

menimbulkan perbedaan pendapat sehingga harus dikaji ulang secara berangsur (Hakiki & Anggraini, 2023; Wartini, 2016).

Sesuai bentuk dari segi menyesuaikan itu ada hal yang bisa saja menjadi konflik akan tetapi dengan mengutamakan kepentingan semua pihak dengan pabrik gula camming dengan sigap melakukan perbaikan dengan melibatkan masyarakat, dan selalu menerima pendapat-pendapat yang diberikan oleh beberapa pihak. penyesuaian dilakukan oleh kedua pihak agar tidak terjadi konflik, dengan sebagai tokoh pemerintah pada kawasan wilayah pabrik gula camming maka selalu memberi saran agar bisa menyesuaikan dan mendapat jalan keluar apa saja yang terjadi, masing-masing menyesuaikan dengan apa yang terjadi dengan posisi masyarakat di desa di titik fokuskan dengan beberapa pekerjaan yang bisa saja membantu ekonomi kehidupan sosial bagi yang belum memiliki kehidupan yang tenang dengan keberadaan pabrik ini sangat menguntungkan bagi masyarakat sekitar wilayah pabrik gula camming, yang mana menyesuaikan dengan gampang dilakukan apabila pihak pabrik gula camming siap terus menerima saran-saran yang diberikan dan terus membuat nyaman untuk masyarakat desa.

Kompromi (*Compromising*)

Dalam rangka mencapai kompromi, penting untuk mempertimbangkan pandangan dan kepentingan dari semua pihak yang terlibat. Konflik, sebagaimana dijelaskan, memiliki potensi untuk diselesaikan melalui negosiasi yang melibatkan pihak-pihak yang berselisih dengan tujuan mencapai kesepakatan jalan tengah yang dapat memberikan keuntungan bagi semua pihak terlibat (Hamdi, 2011; Inayah, 2014). Pendekatan kompromi dianggap sebagai metode efektif untuk meredakan ketegangan dan memfasilitasi proses penyelesaian konflik (Farhan & Hadisaputra, 2021; Malau, 2024). Pendekatan kompromi memungkinkan setiap pihak yang berselisih untuk memberikan dan menerima kontribusi dalam mencapai solusi yang dapat diterima oleh semua (Ichsan, 2022; Kusdiharja et al., 2014). Dengan mengutamakan dialog terbuka dan respektif terhadap pandangan masing-masing pihak, negosiasi dapat menjadi sarana untuk mengatasi perbedaan dan mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak terkait.

Pentingnya pendekatan kompromi juga terletak pada kemampuannya untuk mencegah eskalasi konflik menjadi masalah yang lebih besar. Dengan menemukan jalan tengah yang memenuhi kepentingan semua pihak, pendekatan ini tidak hanya menyelesaikan perselisihan tetapi juga membuka ruang untuk pemahaman saling

menghormati di antara pihak-pihak yang terlibat. Sehingga, konflik dapat diakhiri tanpa meninggalkan dampak negatif yang lebih besar pada hubungan dan interaksi di masa mendatang. Dengan demikian, pendekatan kompromi tidak hanya merupakan alat praktis untuk menyelesaikan konflik, tetapi juga menjadi landasan untuk membangun hubungan yang kuat dan berkelanjutan antara pihak-pihak yang terlibat. Kesiapan untuk memberikan dan menerima merupakan kunci utama dalam mewujudkan keberhasilan pendekatan kompromi dalam mengatasi perbedaan dan mempromosikan perdamaian..

Dalam konteks upaya menjaga kedamaian dan mengelola potensi konflik di wilayah pabrik gula Camming, kedua pihak yang terlibat secara konsisten melakukan proses kompromi. Mereka senantiasa berkomunikasi secara intensif, menerima masukan dari berbagai sumber, dan selalu mengutamakan kepentingan masyarakat terdekat. Fokus utama adalah meningkatkan aspek ekonomi dan kesejahteraan sosial di tingkat masyarakat. Pihak pabrik, sebagai salah satu entitas yang terlibat, memberikan ruang yang cukup untuk melakukan kompromi guna mencegah dan menyelesaikan konflik yang mungkin muncul. Kompromi menjadi prinsip yang terus-menerus dipegang teguh oleh kedua belah pihak, menjadi landasan untuk mewujudkan kerjasama yang harmonis dan berkelanjutan. Peran kompromi tidak hanya berhenti pada pencegahan konflik, namun juga termanifestasi dalam upaya terus-menerus untuk mempertahankan kesepakatan. Proses komunikasi dan negosiasi dijaga agar setiap tindakan atau keputusan yang diambil selalu mendapatkan persetujuan dari masyarakat desa. Pendekatan ini diarahkan untuk memastikan bahwa segala kegiatan yang dilakukan tidak mengganggu kenyamanan dan keharmonisan masyarakat setempat.

Dengan menjaga kontinuitas kompromi dan negosiasi, keduanya pihak berhasil menciptakan suasana yang kondusif, di mana setiap keputusan diambil dengan pertimbangan menyeluruh dan responsif terhadap kebutuhan serta aspirasi masyarakat. Sebagai hasilnya, kerjasama yang terjalin dapat menjadi contoh bagaimana kompromi dan dialog yang terus-menerus dapat membentuk landasan yang kokoh untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan industri dan keberlanjutan masyarakat lokal.

Kerja sama (*Collaboration*)

Kolaborasi merupakan fondasi utama dalam menyelesaikan masalah, di mana semua pihak berkomitmen untuk bekerja sama dengan mempertimbangkan kepentingan masing-masing (Maria et al., 2020; Winara & Mukhtar, 2011). Strategi ini tidak hanya mendukung penyelesaian konflik, tetapi juga menghasilkan solusi yang optimal. Melalui

kolaborasi, terbentuk kerangka kerja di mana ide, pandangan, dan keahlian dari setiap pihak dapat disatukan untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Dalam proses kolaboratif, kepentingan setiap pihak diakui dan dipertimbangkan, menciptakan ruang untuk dialog terbuka dan konstruktif (Mungkasa, 2022). Hal ini memungkinkan terjadinya pertukaran informasi dan ide yang melibatkan semua perspektif yang relevan, sehingga solusi yang dihasilkan mencerminkan kompromi yang adil. Dengan demikian, kolaborasi bukan hanya sekadar penyelesaian masalah, tetapi juga menjadi wadah di mana kepentingan pihak-pihak yang bersaing dapat terpenuhi. Keterlibatan aktif dari semua pihak dalam mencapai solusi bersama menciptakan lingkungan di mana keberlanjutan hubungan menjadi mungkin. Oleh karena itu, hasil yang dihasilkan dari kolaborasi bukan hanya sebatas penyelesaian konflik, tetapi juga pembangunan fondasi yang kokoh untuk kerja sama jangka panjang yang saling menguntungkan.

Kerjasama antara masyarakat dan pabrik gula Camming menciptakan sinergi untuk menyelesaikan masalah yang timbul. Penting untuk dicatat bahwa pendekatan ini tidak mengutamakan kepentingan pihak sendiri, melainkan memprioritaskan kepentingan bersama. Fokusnya adalah mencapai kesepakatan yang memenuhi kebutuhan kedua belah pihak tanpa merugikan salah satu pihak. Kerja sama yang dilakukan mencakup komunikasi yang efektif, dimana pihak-pihak terlibat selalu membahas solusi untuk mengatasi konflik dan berusaha mencegahnya. Upaya ini bertujuan untuk menjaga kehidupan sosial masyarakat agar tetap harmonis. Dalam konteks kerja sama yang terus ditingkatkan, melibatkan masyarakat menjadi suatu prioritas tanpa menimbulkan dampak merugikan terhadap kehidupan mereka. Proses ini juga berkontribusi pada peningkatan perekonomian masyarakat, seiring dengan rekrutmen pekerja yang terus dilakukan dari desa setempat.

Dengan pendekatan kerja sama yang baik, terus menerus melibatkan masyarakat, dan kebijakan rekrutmen yang berkelanjutan, kemitraan antara pabrik gula Camming dan masyarakatnya berkembang secara positif. Hal ini menciptakan lingkungan di mana permasalahan dapat diatasi secara kolektif, dan kehidupan sosial serta perekonomian masyarakat dapat terus meningkat.

KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian ini mencakup empat pendekatan strategi penyelesaian konflik, yaitu menghindari (Avoiding), menyesuaikan (Accommodating), kompromi (Compromising), dan kerja sama (Collaboration). Dalam

strategi menghindari, seluruh pihak secara bersama-sama berupaya untuk mencegah terjadinya konflik. Pihak pabrik turut aktif melakukan tindakan yang bertujuan menghindari dampak negatif keberadaannya terhadap masyarakat. Mereka berkomitmen untuk selalu menguntungkan masyarakat dengan meningkatkan aspek ekonomi dan kehidupan sosial yang berkualitas. Pendekatan menyesuaikan melibatkan penerimaan berbagai pendapat yang beragam dalam menyelesaikan konflik. Dalam hal ini, langkah-langkah konkret diambil untuk mengumpulkan dan mempertimbangkan pendapat-pendapat tersebut, dengan fokus pada pencarian solusi yang memperhatikan kepentingan semua pihak yang terlibat.

Bentuk kompromi terjadi ketika semua pihak cenderung memperhatikan pendapat dan kepentingan satu sama lain. Dengan melakukan negosiasi, konflik yang dapat mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat dapat diatasi dengan mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan, menempatkan kepentingan bersama di garis depan. Dalam bentuk kerja sama, kedua pihak terlibat terus-menerus bekerja sama untuk menyelesaikan konflik. Selama proses ini, perhatian penuh diberikan pada kepentingan masing-masing pihak dan kepentingan yang lebih luas, termasuk kemajuan kehidupan sosial masyarakat dan peningkatan ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa kombinasi berbagai strategi penyelesaian konflik dapat memberikan hasil yang optimal, tergantung pada konteks dan karakteristik konflik yang dihadapi.

REFERENSI

- Anugerah, R. (2014). Peranan Good Corporate Governance. *Jurnal Akuntansi*, 3(1), 101–113.
- Arfani, R. N. (2005). Governance Sebagai Pengelolaan Konflik. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 8. <https://doi.org/10.1007/b138580>
- Azizah, N. (2018). Analisis Penerapan Akuntansi Lingkungan Terhadap Pengelolaan Limbah Sebagai Salah Satu Bentuk Pertanggungjawaban Sosial (Studi Kasus Pada PTPN XIV Pabrik Gula Takalar). In *Thesis*.
- Basri, & Nurhamlin. (2015). *Konflik Masyarakat dan Perusahaan Perkebunan Serta Alternatif Penyelesaiannya di Kabupaten Rokan Hulu*.
- Faisah, N., & Prianto, A. L. (2015). GOOD ENVIRONMENTAL GOVERNANCE (STUDI KASUS PENGELOLAAN TAMAN MACAN DI KOTA MAKASSAR. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(2).

- Farhan, L. P., & Hadisaputra, P. (2021). Conflict Management in Pesantren, Madrasah, and Islamic Colleges in Indonesia: A Literature Review. *Dialog*, 44(1), 37–50. <https://doi.org/10.47655/dialog.v44i1.445>
- Hakiki, M. S., & Anggraini, D. A. (2023). Studi Literatur Kepemimpinan, Konflik dan Manajemen Konflik. *Ojs.Unsulbar.Ac.Id*, 1(2), 121–131. <https://ojs.unsulbar.ac.id/index.php/mandarssj/article/view/2058>
- Hamdi, S. (2011). Politik Islah: Re-Negosiasi Islah, Konflik, Dan Kekuasaan Dalam Nahdlatul Wathan Di Lombok Timur. *Jurnal Kawistara*, 5(3). <https://doi.org/10.22146/kawistara.3902>
- Ichsan, A. C. (2022). Resolusi Konflik Penggunaan Lahan Di Taman Nasional Gunung Rinjani Desa Sajang Kabupaten Lombok Timur. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 11(2), 182–190. <https://doi.org/10.23887/jish.v11i2.35105>
- Inayah, S. S. (2014). Konflik dan Negosiasi dalam Perspektif Komunikasi. *LENTERA*, 16(2 Desember).
- Irwina, S. (2023). *Environmental Govrnance dalam Pengelolaan Limbah Pabrik Gula Camming di Kabupaten Bone*.
- Khairunnisa, Junaedi, Mone, A., & Taufik, A. (2020). Tata Kelola Konflik Kepentingan pada Relokasi Pasar Sentral (New Makassar Mall). *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(2), 156–166.
- Kusdiharja, A., Putra, U., Rinawati, R., Kajian, B., Komunikasi, M., & Komunikasi, I. (2014). Prosiding Manajemen Komunikasi Gaya Manajemen Kompromi Dalam Menekan Konflik Antar Kelompok. *Prosiding Manajemen Komunikasi*, 145–149.
- Liana, A. N., Hendri, N., & Darmayanti, E. F. (2021). Analisis Penerapan Akuntansi Lingkungan Terhadap Pengelolaan Limbah Sebagai Salah Satu Bentuk Pertanggungjawaban Sosial (Studi Kasus Pabrik Singkong Di Dusun Vi Kelurahan Sidodadi Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur). *Jurnal Akuntansi AKTIVA*, 2(2), 204–209.
- Malau, T. W. (2024). Dialog Antaragama Dan Kontribusi Tokoh Agama Dalam Penyelesaian Konflik Dan Implementasinya Untuk Memperkuat Toleransi. *Jurnal Magistra*, 2(1), 1–18.
- Maria, Golar, & Massiri, S. D. (2020). Kolaborasi Stakeholder Dalam Penyelesaian Konflik di Tahura Sulawesi Tengah. *Mitra Sains*, 8(2), 199–214.
- Mungkasa, O. (2022). Optimalisasi Peran dan Fungsi Forum Penataan Ruang sebagai Wadah Kolaborasi Pemangku Kepentingan. *Researchgate.Net*, May.

- https://www.researchgate.net/profile/Oswar-Mungkasa/publication/360515832_Optimalisasi_Peran_dan_Fungsi_Forum_Penataan_Ruang_sebagai_Wadah_Kolaborasi_Pemangku_Kepentingan/links/627b895f973bbb29cc74cd7c/Optimalisasi-Peran-dan-Fungsi-Forum-Penataan-Ruang-se
- Nurkomala, S. A. (2018). *Dampak Industrialisasi Pabrik Terhadap Masyarakat Desa Mekarsari Kecamatan Ciurug Kabupaten Sukabumi* (Vol. 44, Issue 8). <https://doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201>
- Pulungan, A. S. (2017). Analisis Pengelolaan Limbah Cair Kelapa Sawit Di Pabrik PT. X Tahun 2017. In *Thesis*.
- Rizaldi, D. (2021). *Dampak Perusahaan Batu Bara Terhadap Kehidupan Sosial Masyarakat Desa Sumber Sari Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara* (Issue March).
- Sari, E. M. (2018). Analisis Perlakuan Akuntansi Lingkungan Atas Biaya Pengelolaan Limbah Pabrik PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) PPKS Unit Usaha Betung. *Biomass Chem Eng*, 3(2).
- Sudarmanto, E., Sari, diana purnama, Tjahjana, D., Ibowo, E., Mardiani, sri siska, Purba, B., Purba, S., Irdawati, Tjiptadi, diena d, Syafrizal, Kato, I., Rosdiana, Manalu, novita verayanti, & Sn, A. (2021). *Manajemen Konflik*.
- Tahir, A. (2019). Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 2, Issue 2).
- TUO, K. (2017). Pengawasan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Limbah Pt Perkebunan Nusantara X Pabrik Gula Camming Di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone. In *Thesis*.
- UU RI*. (2012). 116.
- Wartini, S. (2016). Strategi Manajemen Konflik Sebagai Upaya Meningkatkan Kinerja Teamwork Tenaga Kependidikan. *Jurnal Manajemen Dan Organisasi*, 6(1), 64. <https://doi.org/10.29244/jmo.v6i1.12194>
- Winara, A., & Mukhtar, A. S. (2011). Potensi Kolaborasi Dalam Pengelolaan Taman Nasional Teluk Cenderawasih Di Papua. *Jurnal Penelitian Hutan Dan Konservasi Alam*, 8(3), 217–226. <https://doi.org/10.20886/jphka.2011.8.3.217-226>
- Zuchdi, D. (2005). Humanisasi Pendidikan Dan Pengembangan Keterampilan Mengatasi Konflik. *Cakrawala Pendidikan*, 2(2), 173–202.